Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
Volume 7, Nomor 2, September 2026
ISSN 2721 - 4311
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP



Dekonstruksi Gizi dan Pergeseran Peran Sekolah: Membaca Peluang Hadirnya Pekerja Sosial Sekolah Pada Program MBG

Mujahiddin[1*], Willya Achmad[2], Nirwansyah Putra[3]
[1)] Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
[2)] Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Pasundan, Indonesia
[3)] Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
*E-mail: mujahiddin@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendekonstruksi paradigma biomedis gizi menuju pendekatan berbasis determinan sosial kesehatan serta mengkaji implikasinya terhadap pergeseran peran sekolah dan peluang hadirnya pekerja sosial sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan yang dianalisis melalui perspektif dekonstruksi Jacques Derrida. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan isu gizi, determinan sosial kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sosial sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG tidak lagi memosisikan persoalan gizi sebagai masalah biologis individual, melainkan sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, akses pangan, lingkungan, dan kondisi keluarga. Pergeseran paradigma tersebut mendorong transformasi fungsi sekolah dari institusi pedagogis menjadi ruang intervensi sosiomedis yang turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan peserta didik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban peran bagi guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, pekerja sosial sekolah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk memperkuat efektivitas, keberlanjutan, dan dimensi keadilan sosial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Determinan Sosial Kesehatan, Pekerja Sosial Sekolah, *Hidden Hunger*

Abstract

This study aims to analyze how the Free Nutritious Meal Program reconstructs the conventional biomedical understanding of nutrition through a social determinants of health perspective and to examine its implications for the changing role of schools and the emergence of school social workers. The study employed a qualitative library research approach using Jacques Derrida's deconstructive analysis. Data were collected from scholarly publications, policy documents, and reports issued by national and international institutions related to nutrition, social determinants of health, education, and school social work. The findings reveal that the program reframes nutritional problems from being merely individual biological conditions to broader social issues shaped by poverty, food access, environmental factors, and family circumstances. This conceptual shift transforms schools from purely pedagogical institutions into socio-medical intervention settings that also bear responsibility for students' well-being. As a consequence, teachers and school administrators face an expansion of responsibilities beyond their primary educational functions. The study concludes that school social workers occupy a strategic role in connecting schools, families, and communities, thereby strengthening the effectiveness, sustainability, and social justice orientation of the Free Nutritious Meal Program.

Keywords*: Free Nutritious Meal Program, Social Determinants of Health, School Social Worker, Hidden Hunger*

Cara citasi : Mujahiddin. Achmad, Willya. Putra, Nirwansyah. (2026) Dekonstruksi Gizi dan Pergeseran Peran Sekolah: Membaca Peluang Hadirnya Pekerja Sosial Sekolah Pada Program MBG. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 7 No 2 September 2026,* 157-173.
DOI: https://doi.org/10.30596/jisp.v7i2.31531

Naskah diterima : 07-07-2026 **Revisi akhir :** 29-10-2026 **Disetujui :** 29-10-2026

Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh negara atau masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup, menciptakan nilai tambah, dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh di berbagai aspek seperti ekonomi, infrastruktur, politik, dan sumber daya manusia. Penjelasan tersebut memberikan makna bahwa pembangunan telah menjadi aspek multidisiplin yang tidak hanya memprioritaskan faktor ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial budaya dan keberlanjutan lingkungan. Seperti yang pernah dicatat oleh Ban Ki-moon, pembangunan sejati harus menawarkan kerangka kerja untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai keadilan sosial dan pelestarian lingkungan (Kim, 2020).

Keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), sebab manusia adalah penggerak sekaligus tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan terbesarnya adalah menciptakan generasi yang sehat dan kompeten. Di Indonesia, upaya ini diimplementasikan lewat berbagai program nyata, termasuk yang paling menarik perhatian dalam satu tahun terakhir adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah taktis ini tidak sekadar menyasar pemenuhan kalori harian, melainkan menjadi intervensi strategis dalam mengatasi ancaman *hidden hunger* (kelaparan tersembunyi).

Hidden hunger merupakan bentuk malnutrisi tingkat seluler yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi kalori dalam jumlah cukup untuk merasa kenyang, namun tubuhnya mengalami defisit zat gizi mikro (*micronutrient deficiencies*) esensial, seperti zat besi, vitamin A, yodium, dan zink (Organization, 2024). Kondisi ini kerap kali terabaikan karena penderitanya tidak menunjukkan gejala klinis tubuh kurus kering, bahkan beberapa di antaranya memiliki berat badan normal atau berlebih. Padahal, dampak jangka panjang dari kelaparan tersembunyi ini sangat destruktif, mulai dari kegagalan pertumbuhan fisik (stunting), penurunan kapasitas kognitif (IQ) anak, hingga penurunan produktivitas ekonomi generasi masa depan (Drewnowski & Specter, 2004).

Data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga internasional seperti Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan UNICEF menunjukkan bahwa diperkirakan 20% hingga 40% masyarakat Indonesia mengalami gejala kelaparan tersembunyi, yang dipicu salah satunya oleh rendahnya konsumsi sayur dan buah secara konsisten di tingkat rumah tangga (Keeley et al., 2019; Riskesdas, 2019;

Octavia & Nirmala, 2026). Pada tingkat anak Balita di Indonesia, menurut data UNICEF terdapat sekitar 50% hingga 59% yang masuk dalam katagori "*not growing well*", di mana sebagian besar dari persentasi tersebut merupkan korban *hidden hunger* jangka panjang (Keeley et al., 2019).

Selama ini, intervensi terhadap masalah gizi buruk cenderung bias pada pendekatan biomedis yang bersifat kuratif, seolah-olah penanganannya cukup diselesaikan dengan membagikan suplemen atau obat-obatan. Padahal, jika dibongkar lebih dalam melalui pendekatan *Social Determinants of Health* (SDOH), *hidden hunger* bukanlah sekadar masalah biologis atau kelalaian pilihan gaya hidup individu. Kelaparan tersembunyi merupakan produk struktural dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat masyarakat tersebut hidup (Marmot et al., 2008). Aspek ekonomi menjadi aspek yang paling krusial karena menyangkut kondisi kemiskinan yang membatasi daya beli rumah tangga untuk menjangkau bahan pangan segar dan bervariasi seperti daging dan buah-buahan.

Keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau kemiskinan secara rasional akan terjebak ke dalam fenomena *energy-density premium*, yaitu kecenderungan memilih "kalori murah" berbasis karbohidrat tinggi demi mengejar rasa kenyang fisik yang instan dan menekan pengeluaran (UNICEF, 2023). Kondisi ini diperparah oleh pengaruh lingkungan seperti kemunculan *food swamps* (lingkungan yang dibanjiri makanan olahan rendah gizi) serta rendahnya literasi gizi di dalam keluarga (Colozza, 2021). Untuk itu, membongkar masalah hidden hunger menuntut adanya bentuk intervensi langsung yang mengarah pada faktor-faktor sosial tersebut secara sistemik.

Salah satu upaya untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis melalui peluncuran kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikordinatori oleh Badan Gizi Nasional. Kebijakan ini secara fundamental menggeser paradigma ketahanan pangan nasional dari yang sekadar berorientasi pada pemenuhan kuantitas kalori menjadi pemenuhan kualitas gizi mikro yang seimbang. Dengan menyediakan intervensi makanan padat gizi secara langsung kepada kelompok rentan—mulai dari ibu hamil, balita, hingga anak sekolah—program MBG bertindak sebagai instrumen negara untuk mengintervensi ketimpangan ekonomi dan akses pangan yang menjadi akar utama *hidden hunger*. Program ini berupaya mengambil alih beban finansial pengadaan gizi mikro yang selama ini gagal dipenuhi oleh keluarga pra-sejahtera.

Meskipun memiliki potensi besar sebagai solusi struktural atas kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*), efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan masih dihadapkan pada tantangan tata kelola, konsistensi mutu gizi, serta adaptasi terhadap karakteristik determinan sosial di masing-masing daerah (Lendra et al., 2025; Mozin et al., 2026). Masalah ini berkelindan dengan standarisasi menu; tanpa kontrol ketat, program ini dikhawatirkan terjebak dalam formalitas pemenuhan kuantitas porsi demi mengejar target serapan, ketimbang menjaga konsistensi mutu gizi mikro (*micronutrient*). yang krusial untuk otak dan imunitas anak. Lebih jauh lagi, pola kebiasaan makan keluarga di pedalaman yang sarat pangan lokal tentu membutuhkan pendekatan komunikasi dan variasi menu yang berbeda dibanding masyarakat urban yang terkepung *food swamps*.

Di satu sisi, kehadiran program MBG juga mengeser peran dan fungsi sekolah dalam ekosistem pendidikan. Sekolah tidak lagi sekadar beroperasi sebagai ruang transfer interaksi akademis dan pedagogik murni, melainkan bertransformasi menjadi agen intervensi kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Pergeseran ini menuntut rekonseptualisasi tugas guru dan kepala sekolah yang kini memikul tanggung jawab sekunder sebagai pengawas rantai pasok logistik dan penjamin mutu gizi harian anak (Gulo et al., 2026). Melalui aktivitas pemenuhan nutrisi kolektif di lingkungan kelas, sekolah kini memegang peran strategis dalam melakukan rekayasa sosial—mulai dari mengikis segregasi sosial-ekonomi siswa lewat standardisasi konsumsi, hingga mendobrak rendahnya literasi gizi keluarga secara langsung di lapangan.

Namun, pergeseran peran sekolah ini membawa tantangan baru. Pihak sekolah (guru dan kepala sekolah) sering kali kewalahan karena harus mengurusi administrasi gizi, sekaligus menghadapi kompleksitas latar belakang sosial ekonomi siswa di rumah yang menjadi akar dari malnutrisi tersebut. Guru tidak memiliki kompetensi atau waktu untuk melakukan intervensi psikososial ke rumah siswa yang mengalami interospeksi gizi buruk. Guna mengantisipasi risiko tumpang tindih peran (*role overload*) pada guru akibat tuntutan tata kelola MBG, urgensi kehadiran pekerja sosial sekolah menjadi tidak terbantahkan. Pekerja sosial sekolah dapat diasumsikan sebagai manajer kasus yang menjembatani di mensi klinis gizi di sekolah dengan realitas domestik siswa di rumah. Melalui kompetensi asesmen berbasis *Social Determinants of Health* (SDOH) dan kemampuan intervensi psikososial, mereka mampu memetakan hambatan struktural keluarga, mengedukasi orang tua, hingga mengawasi akuntabilitas program tanpa

mendistorsi fungsi pedagogis guru. Integrasi pekerja sosial dalam ekosistem pendidikan ini tidak hanya meringankan beban administratif guru, melainkan menjamin bahwa pemenuhan nutrisi program MBG diintervensi secara komprehensif, baik dari hulu lingkungan keluarga hingga hilir di ruang kelas.

Artikel ini berupaya mengisi celah penting dalam literatur mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Hingga saat ini, kajian-kajian tentang MBG cenderung didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada luaran program seperti perbaikan status gizi dan kesehatan anak (Widyasari et al., 2025; Jamal & Adinda, 2026), pemenuhan hak sosial dan ekonomi (Rahman et al., 2025), serta tata kelola logistik dan implementasi program MBG (Serang et al., 2025; Lendra et al., 2025b; Koton et al., 2025). Keseluruhan artikel tersebut menghasilkan pemahaman yang relatif komprehensif mengenai efektivitas dan tata kelola MBG namun belum melihat implikasi implementasi MBG terhadap dinamika organisasi sekolah, khususnya potensi munculnya peran berlebih (role overload) pada guru sebagai aktor pelaksana di tingkat lapangan.

Oleh karenanya, penelitian ini menawarkan perspeketif alternatif yang menempatkan sekolah, guru dan konsekuensi yang kurang terlihat dari implementasi MBG ini dengan memposisikan peluang hadirnya pekerja sosial sekolah dalam implementasi MBG yang bertujuan meningkatan gizi anak dan mengatasi kelaparan tersembunyi. Kebaharuan dalam artikel ini terletak pada integrasi profesi pekerja sosial sekolah (*school social worker*) di dalam pelaksanaan MBG. Melalui pendekatan dekonstruksi, kehadiran pekerja sosial sekolah diposisikan bukan sekedar sebagai staf pendukung, tetapi sebagai aktor strategis-profesional yang mengintervensi *Social Determinants of Health* siswa dari hulu (lingkungan domestik keluarga) hingga ke hilir (ruang kelas), sekaligus membebaskan guru dari beban non-pedagogis. Untuk itu artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian yaitu; (1) bagaimana program MBG mendekonstruksi paradigma biomedis gizi menjadi sebuah intervensi berbasis determinan sosial kesehatan (*social determinants of health*)? (2) Bagaimana dekonstruksi konsep gizi tersebut berimplikasi pada peran institusi sekolah sekaligus membuka urgensi kehadiran pekerja sosial sekolah sebagai aktor intervensi sosiomedis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Studi ini tidak hanya melakukan review naratif yang konvensional, tetapi analisis pada setiap artikel kepustakaan dilakukan dengan analisis

dekonstruksi Jacques Derrida. Pendekatan dekonstruksi digunakan untuk membongkar, menguji, dan mempertanyakan kembali oposisi biner serta asumsi-asumsi mapan yang selama ini melekat pada konsep intervensi gizi anak sekolah dan peran tradisional institusi pendidikan. Di dalam metode ini, dekontruksi tidak dipandang sebagai metode yang kaku (*method-driven research*), melainkan sebuah strategi pembacaan kritis (*deconstructive reading strategy*) untuk menyingkap instabilitas makna, kontradiksi internal, serta relasi kuasa yang tersembunyi di balik teks kebijakan maupun literatur ilmiah (Derrida, 2001; Sediq, 2024; Saikhudin et al., 2026).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur sekunder yang bereputasi dari berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan JSTOR. Sumber data kepustakaan juga mencakup dokumen kebijakan resmi pemerintah terkait program MBG, laporan ilmiah lembaga internasional seperti UNICEF, WHO, dan GAIN serta beberapa artikel jurnal ilmiah yang membedah tema *Social Determinants of Health* (SDOH), tata kelola pangan sekolah, krisis beban peran (role overload) guru, dan konsep pekerjaan sosial sekolah (*school social work*). Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan mengadopsi teknik *five-step deconstructive reading method* yang dioprasionalkan sebagai berikut (Derrida, 2001; Somekh & Lewin, 2005; Kavula Sikirivwa, 2020):

1) Mengidentifikasi Oposisi Biner (*Identifying Binary Oppositions*): Langkah awal dilakukan dengan memetakan oposisi biner hierarkis yang tidak netral di dalam literatur, seperti kutub *"Biomedis/Klinis vs Struktural/Sosial"* dalam isu gizi, serta kutub *"Pedagogis/Akademis vs Kesejahteraan/Domestik*" dalam fungsi sekolah. Langkah ini penting untuk menyingkap bagaimana struktur makna dibangun dengan mengunggulkan salah satu kutub secara dominan.
2) Pembalikan Hierarki Makna (*Reversing Hierarchies*): Setelah oposisi biner diidentifikasi, peneliti membalikkan hierarki tersebut untuk membuktikan bahwa konstruksi tersebut tidak bersifat alamiah melainkan hasil konstruksi sosial. Peneliti menunjukkan bahwa dimensi sosial-kesejahteraan yang selama ini dianggap "marginal" sebenarnya memegang peran penentu yang krusial dalam aspek gizi.
3) Membongkar Kontradiksi Internal (*Exposing Internal Contradictions/ Aporia*): Peneliti melacak ketegangan dan kebuntuan (aporia) antara apa yang ingin disampaikan oleh teks kebijakan dengan realitas objektif yang dihasilkannya, seperti tuntutan agar sekolah berfokus pada fungsi pengajaran yang berbenturan dengan

fakta bahwa sekolah dipaksa mengurus birokrasi logistik gizi mikro yang memicu tumpang tindih peran pendidik.

4) Melacak Jejak Makna (*Tracing the Trace - Différance*): Langkah ini dilakukan dengan menelusuri jejak-jejak residual makna (*trace*) dan keterkaitan antar tanda yang tidak terlihat secara langsung, untuk membongkar bagaimana konsep gizi dan fungsi sekolah selalu mengalami penundaan (*deferral*) dan perbedaan (*difference*) yang cair tergantung pada konteks sosial-ekonomi.
5) Membuka Kemungkinan Interpretasi Baru (*Opening New Interpretive Possibilities*): Setelah struktur teks berhasil didekonstruksi, peneliti tidak berhenti pada penilangan makna semata, melainkan mengupayakan rekonstruksi untuk membuka ruang pemikiran yang solutif. Pada tahap inilah dirumuskan model peluang integrasi profesi Pekerja Sosial Sekolah (School Social Worker) sebagai aktor intervensi sosiomedis yang tepat untuk mengawal keberlanjutan program MBG.

Validitas dan reliabilitas interpretasi dalam studi kepustakaan ini dijaga melalui teknik *triangulasi* sumber teoretis, yaitu dengan mengonfrontasikan berbagai perspektif teori intervensi sosial, sosiologi pendidikan, dan pekerjaan sosial untuk menghasilkan sebuah sintesis konseptual yang objektif, kritis, dan mampu menawarkan satu model konseptual transformatif (Sediq, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Paradigma Biomedis Gizi dalam Program MBG: Menuju Intervensi Berbasis *Social Determinants of Health* (SDOH)

Selama beberapa dekade, diskursus mengenai penanganan gizi buruk dan malnutrisi di Indonesia terjebak dalam hegemoni paradigma biomedis yang bias kuratif (Muchlis et al., 2023). Paradigma ini memandang masalah kekurangan gizi mikro (*micronutrient deficiencies*) atau *hidden hunger* hanya sebagai kegagalan biologis individu yang penyelesaiannya cukup diselesaikan melalui pembagian suplemen, obat-obatan, atau program pemulihan klinis di fasilitas kesehatan (Acolin & Fishman, 2023). Pandangan reduksionis ini menyingkirkan realitas bahwa malnutrisi bukanlah masalah pilihan gaya hidup (*lifestyle choices*) yang berdiri sendiri, melainkan sebuah produk struktural yang lahir dari ketimpangan sosial dan ekonomi tempat individu tersebut hidup. Muchlis et al., (2023) mencontohkan hal tersebut dalam konteks alokasi belanja rumah tangga miskin di perdesaan Indonesia yang lebih banyak dihabiskan untuk rokok dari pada makanan bergizi untuk anak-anak.

Hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional secara fundamental melakukan dekonstruksi terhadap paradigma biomedis tersebut (Rahmah et al., 2025). MBG meruntuhkan oposisi biner tradisional yang memisahkan antara "intervensi medis/klinis" (yang dianggap primer) dan "intervensi sosial/ekonomi" (yang dianggap sekunder). Melalui penyediaan makanan padat gizi secara langsung dan universal di lingkungan sekolah, program ini menggeser fokus ketahanan pangan nasional: dari yang semula hanya berorientasi pada pemenuhan kuantitas kalori asal kenyang (*energy-density premium*) akibat keterbatasan daya beli keluarga prasejahtera, menjadi pemenuhan kualitas gizi mikro esensial (seperti zat besi, vitamin A, yodium, dan zink) yang dijamin langsung oleh negara. Dengan kata lain, MBG mengonseptualisasikan ulang pemenuhan zat gizi yang bukan hanya sebatas domain klinis-kedokteran melainkan sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan fiskal dan intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Waluyo, (2025) menyebutnya sebagai bentuk kebijakan kesejahteraan makro (welfare policy) yang digerakkan oleh negara untuk mengatasi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

Pergeseran konseptual dari dekonstruksi gizi ini sejalan dengan temuan jajaran riset global yang dihimpun oleh Sari et al., (2025) melalui studi literatur sistematis mereka. Dalam analisis klaster bibliometriknya, Sari et al., (2025) menunjukkan bahwa evolusi penelitian internasional mengenai kebijakan makan gratis di sekolah telah bergeser secara masif: dari yang semula berfokus pada luaran biomedis (*biomedical nutrition outcomes*) beralih ke arah tata kelola yang integratif, keadilan sosial, dan koordinasi multisektoral. Hal ini dapat dilihat dari berbagai negara seperti Brazil dengan Programa *Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) yang memperlihatkan bahwa suksesnya intervensi gizi di sekolah terjadi ketika program tersebut dilepaskan dari sekat-sekat klinis murni dan diintegrasikan dengan penguatan rantai pasok petani lokal serta pemberdayaan ekonomi komunitas.

Ketika MBG ditarik ke dalam kerangka *Social Determinants of Health* (SDOH) seperti yang dituliskan oleh Marmot et al., (2008), maka intervensi ini bekerja secara sistemik pada tingkat lingkungan (*environmental and structural levels*). Program MBG bertindak sebagai kompensasi struktural atas kegagalan pasar dan kemiskinan domestik yang selama ini membatasi akses anak-anak terhadap bahan pangan segar. Di daerah-daerah perkotaan maupun pedalaman yang dikepung oleh *food swamps* (makanan olahan rendah

gizi), MBG hadir mengintervensi langsung ke hilir (ruang kelas) guna mengambil alih beban finansial pengadaan nutrisi mikro yang gagal dipenuhi orang tua pra-sejahtera.



Gambar 1. MBG Sebagai Instrumen Negara Dalam Mengintervensi Ketimpangan Ekonomi dan Akses Pangan

Sumber Gambar: diolah dari data penelitian melalui notebooklm.

Dampak pemoderasi sosiomedis dari intervensi pangan berbasis sekolah ini secara kokoh terkonfirmasi melalui analisis ekonometrika kesehatan yang dilakukan oleh Heijnk et al., (2026) di Jerman dengan menggunakan data dari gelombang kedua studi KiGGS (2014-2017) dan menyusun *Healthy Nutrition Score for Kids and Youth* (HuSKY) yang diperbarui, Heijnk et al., (2026) menerapkan metode *propensity score matching* untuk meneliti dampak penawaran makan siang sekolah terhadap anak-anak usia 6 hingga 13 tahun. Temuan model efek campuran (*mixed-effects model*) mereka menunjukkan adanya interaksi negatif yang signifikan antara status sosial ekonomi (*Socioeconomic Status*/SES) dan penawaran makan siang sekolah terhadap kualitas diet total harian anak. Garis slope kualitas diet pada anak-anak yang mendapatkan makan siang di sekolah terbukti jauh lebih landai (*flatter slope*) dibandingkan anak-anak yang makan di rumah. Hal ini memberikan bukti empiris yang sangat kuat secara global bahwa program pangan berbasis sekolah secara efektif mampu memitigasi dan memperkecil ketimpangan kualitas diet yang dipicu oleh disparitas SES keluarga pra-sejahtera. Makanan sekolah bertindak sebagai faktor ekualisasi sosiologis, karena manfaat terbesar dari perbaikan kualitas nutrisi tersebut justru diserap oleh anak-anak dari kelas sosial-ekonomi rendah.

Namun, dekonstruksi paradigma ini juga menuntut adanya standardisasi mutu gizi mikro yang ketat agar tidak terjebak dalam formalitas kuantitas porsi demi mengejar target administratif semata. Pentingnya intervensi pangan dalam mengubah lanskap ketersediaan makro dan mikro nutrisi ini digambarkan secara detail dalam studi *Creating*

Healthy, Active and Nurturing Growing-up Environments (CHANGE) oleh Cohen et al., (2014) di Amerika Serikat. Melalui uji lapangan terkontrol acak (*randomized controlled trial*) di wilayah pedalaman yang miskin akses pangan segar, Cohen et al., (2014) menemukan bahwa intervensi layanan makanan sekolah yang berfokus pada kualitas—seperti peningkatan drastis ketersediaan gandum utuh (*whole grains*)—berhasil meningkatkan ounces konsumsi gizi mikro anak secara signifikan dan menepis ketergantungan mereka pada kalori murah rendah gizi berbasis karbohidrat olahan (*refined grains*). Cohen et al., (2014) menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga pra-sejahtera di wilayah pedalaman sangat bergantung pada makanan sekolah untuk memenuhi 50% dari total asupan energi harian mereka karena rusaknya ekosistem pasar retail lokal (*food swamps*) di sekitar rumah mereka. Oleh sebab itu, penjaminan kualitas zat gizi makro dan mikro dalam MBG di ruang kelas adalah bentuk intervensi lingkungan yang mutlak diperlukan untuk menyelamatkan kapasitas kognitif generasi masa depan (Best et al., 2010; Rahmah et al., 2025).

Namun demikian, dekonstruksi paradigma dari pendekatan klinis menuju pendekatan struktural-lingkungan ini memicu konsekuensi institusional baru. Penanganan masalah sosial-kesehatan menjadi tugas dan beban dari institusi sekolah. Ketika gizi diakui sebagai masalah sosial-struktural, maka sekolah tidak lagi beroperasi sebagai ruang pedagogis murni bagi siswa. Sekolah dipaksa untuk bertransformasi menjadi lembaga intervensi sosiomedis yang diwajibkan untuk terlibat mengelola kompleksitas malnutrisi siswa yang berakar dari kondisi sosial-ekonomi keluarga. Kegagalan dalam memetakan aspek SDOH dari keluarga/rumah inilah yang menurut (Sari et al., 2025) sering memicu masalah baru di lapangan, seperti penolakan makanan oleh siswa karena ketidaksesuaian makanan (misalnya *emotional eating*/gangguan makan), ketidaksesuaian dalam budaya lokal, potensi *food waste*, hingga administrasi gizi yang membingungkan pihak sekolah.

Kompleksitas operasional ini juga terekam dalam evaluasi kualitatif menggunakan *Consolidated Framework for Implementation Research* (CFIR) oleh Tabak & Moreland-Russell, (2015) yang menyoroti bahwa rigiditas regulasi gizi baru sering kali memicu dropnya partisipasi siswa dan resistensi dari tenaga pendidik akibat tuntutan waktu administrasi dan persiapan menu yang menyita waktu mengajar. Hal senada juga ditunjukkan oleh (Thompson et al., (2022) di mana upaya memaksa guru menjadi agen promotor verbal atau melakukan *role modeling* makan bersama di kantin sekolah tidak

serta merta memperbaiki kualitas rasa makanan, melainkan hanya menambah beban non-pedagogis guru. Kerumitan integrasi antara kurikulum, ketahanan pangan, dan manajemen sisa makanan (*plate-waste*) universal ini—sebagaimana diprotokolkan oleh (Engler-Stringer et al., 2021) dalam program *The Good Food for Learning* di Kanada—menegaskan secara teoretis bahwa pemenuhan nutrisi anak sekolah tidak akan pernah mencapai keberlanjutan jika hanya dibebankan pada pundak guru.

Lebih mendalam lagi, studi etnografis oleh Black et al., (2022) mengungkap sisi kemanusiaan dari dekonstruksi peran ini, di mana penghapusan staf dapur internal sekolah demi efisiensi katering eksternal (*airplane food style*) justru menciptakan "care gap" atau kekosongan kepedulian yang mendalam bagi siswa. Siswa pra-sejahtera tidak hanya membutuhkan zat besi atau vitamin secara biologis, melainkan membutuhkan relasi interpersonal yang hangat, yaitu adanya aktor terpercaya di sekolah yang mengenali preferensi psikologi dan budaya mereka, serta merancang pengalaman makan bersama yang inklusif (*inclusive social dining experience*) demi mengikis stigma sosial dan pengucilan (*bullying*) di ruang kelas.

Oleh karena itu, dekonstruksi konsep gizi dalam program MBG ini secara komprehensif membuktikan bahwa pemenuhan nutrisi anak sekolah adalah sebuah jaring pengaman sosial yang berlapis (Acolin & Fishman, 2023; Kiftiyah et al., 2025). Di sinilah letak urgensi struktural yang tidak terbantahkan untuk mengintegrasikan profesi Pekerja Sosial Sekolah (*School Social Worker*). Berbekal kompetensi asesmen berbasis SDOH dan kemampuan intervensi psikososial, pekerja sosial sekolah hadir sebagai aktor kunci untuk memediasi dan menjembatani realitas klinis gizi di sekolah dengan realitas domestik siswa di rumah (Edyburn et al., 2023), mengurai hambatan kemiskinan keluarga, serta mengisi ruang kepedulian yang retak, tanpa mendistorsi fungsi pedagogis guru di ruang kelas (Allen-Meares et al., 2004).

Implikasi Dekonstruksi Gizi Pada Peran Institusi Sekolah dan Peluang Hadirnya Pekerja Sosial Sekolah Sebagai Aktor Intervensi Sosiomedis

Kelanjutan logis dari dekonstruksi konsep gizi—dari paradigma biomedis menuju kerangka *Social Determinants of Health* (SDOH) pada bagian sebelumnya—membawa dampak bagi eksistensi institusi sekolah. Ketika nutrisi anak diakui sebagai manifestasi dari ketimpangan sosiopolitik, ekonomi, dan kemiskinan domestik, fungsi tradisional sekolah secara otomatis mengalami perluasan fungsi kelembagaan secara paksa (*institutional role creep*). Sekolah tidak lagi dapat beroperasi sebagai ruang pedagogis

murni tempat transfer pengetahuan akademis berlangsung, melainkan dipaksa bertransformasi menjadi garis depan jaring pengaman sosial nasional (*social safety net*) dan lembaga pembangunan sosial.

Pergeseran peran ini membebankan tugas sekunder yang sangat berat bagi guru dan kepala sekolah, yang kini memikul tanggung jawab administratif logistik katering, pengawasan rantai pasok, dan penjaminan mutu gizi harian anak. Krisis beban peran (*role overload dan role strain*) yang dialami para pendidik di lapangan ini berkelindan secara rumit dengan kebuntuan cara pandang tradisional sekolah dalam menangani masalah kesejahteraan siswa. Edyburn et al., (2023) dalam *School Psychology Review* menegaskan bahwa mayoritas sistem sekolah di dunia nyata masih terjebak dan beroperasi di bawah payung traditional *medical models* yang kaku. Model tradisional ini sangat bergantung pada paradigma individualistik, *identity-blind* (buta identitas), bersifat patologis, serta menganut pendekatan reaktif wait-to-fail.

Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimpangan ini terlihat ketika penanganan siswa yang mengalami dampak *hidden hunger* hanya diselesaikan melalui pendekatan individualistik atau dalam konteks lain baru mengidentifikasi anak yang membutuhkan bantuan setelah mereka mengalami kegagalan akademik yang berkepanjangan di sekolah. Pendekatan melokalisasi masalah di dalam diri anak tanpa mengevaluasi faktor lingkungan (*within-person hypotheses*) ini gagal mengatasi akar malnutrisi struktural dan justru memperkuat narasi berbasis defisit (*deficit-based narratives*) terhadap kelompok marginal. Akibatnya, pihak sekolah sering kali kewalahan karena harus mengurusi administrasi gizi, sekaligus menghadapi kompleksitas latar belakang sosial ekonomi siswa di rumah, yang berujung pada kebuntuan operasional dan distorsi terhadap fungsi pengajaran pedagogis guru.

Kebuntuan operasional ini diperparah oleh dinamika internal sekolah sebagai lokasi intervensi sosial. Berbeda dengan kondisi laboratorium yang terkontrol, sekolah merupakan lingkungan yang cair, tidak statis, dan dipenuhi tantangan ekologis. (Mishna et al., 2012) dalam *Anticipating Challenges: School-based Social Work Intervention Research* mengidentifikasi sejumlah hambatan nyata yang dihadapi saat menjalankan intervensi sosial di lingkungan sekolah:

1. Keterbatasan ruang fisik yang privat untuk konseling, benturan alokasi waktu antara jam pelajaran reguler dengan agenda intervensi, serta tuntutan pelatihan staf (*staff training*) yang masif sering kali memicu hambatan pelaksanaan di lapangan.

2. Keberhasilan intervensi sangat bergantung pada perolehan dukungan di berbagai level, mulai dari dewan sekolah, kepala sekolah, hingga guru kelas. Kurangnya komitmen dari pihak administrasi terbukti secara nyata menghambat kerja sama dan menurunkan efektivitas program.
3. Sekolah rentan terhadap perubahan kepemimpinan dan staf pendidik yang pensiun atau pindah tugas. Ketika figur yang akrab dengan siswa digantikan oleh personel baru yang resisten, tingkat kepatuhan di sekolah terhadap protokol intervensi sosial-gizi dikawatirkan dapat mengalami penurunan.

Kerumitan tata kelola mikro ini diperkuat oleh data dari Kelly et al., (2016) yang menunjukkan bahwa budaya sekolah yang menuntut tingginya beban kasus dan dokumen administratif non-pedagogis menjadi alasan utama mengapa pencegahan berbasis lingkungan sulit terwujud. Guru ditarik terlalu jauh untuk mengurusi birokrasi pangan yang mengganggu waktu mengajar mereka. Di Indonesia kondisi ini diperparah dengan adanya beban kerja guru yang harus mengisi laporan kinerja secara berkala. Energi profesional guru sejak awal sudah tergerus oleh tuntutan pemenuhan bukti dukungan administratif demi formalitas penilaian kinerja (Yahya & Martha, 2025).

Ketika birokrasi Program MBG dibebankan ke pundak yang sama, maka penjaminan kualitas zat gizi anak di sekolah berisiko terjabak menjadi sekadar rutinitas pelaporan logistik yang kehilangan esensi intervensi sosialnya. Lapoarn yang ditulis oleh CNN Indonesia (2025) menjelaskan bahwa pemerintah kini memberikan insentif sebesar Rp. 100.000,- perhari bagi guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional MBG di sekolah. Kebijakan ini menegaskan bahwa beban administrasi guru dalam birokrasi pangan sekolah mulai diakui secara formal oleh negara melalui pemberian kompensasi finansial harian.

Kebuntuan operasional dan dinamika filosofi penyelenggaraan pendidikan di sekolah inilah yang secara otomatis membuka peluang untuk hadirnya pekerja sosial sekolah sebagai aktor intervensi sosiomedis. Pekerja sosial sekolah hadir sebagai profesi khusus yang dilatih untuk bergerak secara dinamis di antara batas-batas institusi guna memediasi hubungan antara anak, rumah, sekolah, dan komunitas (Peckover et al., 2012). Ketika guru tidak memiliki waktu maupun kompetensi untuk mengurai kompleksitas latar belakang rumah tangga siswa, Pekerja Sosial Sekolah hadir menawarkan model intervensi

sosiomedis yang terstruktur melalui tiga pilar transformasi sosiomedis yang diadaptasi dari kerangka kerja (Edyburn et al., 2023):

1. Pendesentralisasian Asesmen Medis-Defisit Individual: Pekerja sosial menggeser fokus sekolah dari tendensi reaktif yang gemar melabeli atau mematologikan anak dengan masalah gizi buruk. Alih-alih melihat malnutrisi sebagai kegagalan biologis bawaan anak, peksos melakukan pengumpulan data ekologis untuk melihat hambatan struktural apa yang sedang dialami keluarga siswa di rumah.
2. Pencentralisasian Kerja pada Tingkat Sistem (Systems-Level Work): Pekerja sosial memimpin tata kelola pencegahan di sekolah secara sosiomedis melalui model Multitiered Systems of Support (MTSS). Pekerja sosial bertugas di area Tier 1 (universal) untuk memastikan seluruh siswa menerima hak nutrisi yang setara tanpa diskriminasi visual, serta merancang pengalaman makan bersama yang inklusif (inclusive social dining experience) demi mengikis stigma sosial, pelabelan negatif, dan pengucilan (bullying) di ruang kelas (Allen-Meares et al., 2013). Pekerja sosial juga melakukan advokasi kebijakan sekolah (policy work) dan mengaudit akuntabilitas menu pangan katering bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
3. Intervensi Arus Hulu (Ranah Domestik): Pekerja sosial mengurai hambatan struktural kemiskinan keluarga, membangun kapasitas orang tua, mengedukasi literasi gizi untuk memutus jerat energy-density premium, serta merajut kerja sama dengan lembaga jaminan sosial pemerintah dan kemitraan ekonomi lokal. Hubungan kolaboratif yang kuat dan berkelanjutan (enduring relationships) yang dibangun oleh peksos dengan keluarga dan komunitas menjadi kunci utama yang menjaga keberlanjutan program di tengah berbagai hambatan struktural sekolah.

Melalui pemetaan ekologis hulu dan hilir tersebut, kehadiran Pekerja Sosial Sekolah menemukan urgensi teoretisnya yang mutlak. Sebagaimana ditegaskan secara historis oleh (Constable, 2008) pekerja sosial sekolah bukanlah sekadar profesi klinis yang "ditempelkan" begitu saja di dalam institusi pendidikan, melainkan sebuah instrumen integral yang melayani hak dasar anak atas pendidikan yang bermartabat. Ketika dekonstruksi konsep gizi membongkar bahwa *hidden hunger* bersumber dari ketimpangan struktural, maka kegagalan anak dalam menyerap kurikulum akibat kelaparan terselubung di rumah sejatinya merupakan bentuk perampasan hak anak atas

pendidikan. Di sinilah pekerja sosial sekolah masuk secara dinamis untuk menjelajahi batas-batas (*spanning the boundaries*) institusional yang kaku. Berlandaskan pada konstelasi kolaboratif yang erat antara guru, orang tua, dan murid, pekerja sosial mengasumsikan peran sebagai jembatan sosiomedis. Mereka mengurai jarak emosional dan kesenjangan budaya (*gaps*) yang gagal dijangkau oleh guru kelas, memastikan pemenuhan gizi MBG tersalurkan secara inklusif di lingkungan sekolah, sekaligus mengoordinasikan intervensi lingkungan yang komprehensif dari ranah domestik hingga ke meja makan ruang kelas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif dekonstruksi, persoalan gizi anak tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, akses pangan, lingkungan, dan kondisi keluarga sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *Social Determinants of Health* (SDOH). Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merepresentasikan pergeseran dari pendekatan biomedis menuju intervensi kesejahteraan sosial yang menempatkan negara sebagai penjamin akses gizi berkualitas bagi kelompok rentan, sekaligus memperluas peran sekolah sebagai ruang intervensi sosiomedis yang berpotensi menambah beban guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, pekerja sosial sekolah menjadi aktor strategis dalam menjembatani sekolah, keluarga, dan komunitas melalui asesmen sosial, advokasi, edukasi keluarga, serta pengelolaan kasus berbasis lingkungan. Kehadiran mereka berpotensi memperkuat efektivitas dan keberlanjutan MBG agar tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis anak, tetapi juga mendorong keadilan sosial dan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Acolin, J., & Fishman, P. (2023a). Beyond the biomedical, towards the agentic: A paradigm shift for population health science. *Social Science and Medicine*, *326*. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115950

Allen-Meares, P., Montgomery, K. L., & Kim, J. S. (2013). School-based social work interventions: A cross-national systematic review. *Social Work (United States)*, *58*(3), 253–262. https://doi.org/10.1093/sw/swt022

Allen-Meares, P., Washington, R. O., & Welsh, B. L. (2004). School social work: Historical development, influences, and practices. *Social Work Services in Schools*, *5*.

Best, C., Neufingerl, N., Van Geel, L., van den Briel, T., & Osendarp, S. (2010). The nutritional status of school-aged children: why should we care? *Food and Nutrition Bulletin*, *31*(3), 400–417.

Black, J. L. ;, Mazac, R. ;, Heckleman, A. ;, & Elliott. (n.d.). *Unwrapping school lunch: Examining the social dynamics and caring relationships that play out during school lunch*. https://doi.org/10.15353/cfs-rcea.v9i2

CNN Indonesia. (2025, September 30). Guru penanggung jawab MBG kini dapat insentif Rp100 ribu per hari. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250930125035-92-1279228/guru-penanggung-jawab-mbg-kini-dapat-insentif-rp100-ribu-per-hari

Cohen, J. F. W., Rimm, E. B., Bryn Austin, S., Hyatt, R. R., Kraak, V. I., & Economos, C. D. (2014). A food service intervention improves whole grain access at lunch in rural elementary schools. *Journal of School Health*, *84*(3), 212–219. https://doi.org/10.1111/josh.12133

Colozza, D. (2021). Dietary health perceptions and sources of nutritional knowledge in an urban food environment: a qualitative study from Indonesia. *Public Health Nutrition*, *24*(10), 2848–2858.

Constable, R. (2008). The role of the school social worker. In R. Constable, C. R. Massat, S. McDonald, & J. P. Flynn (Eds.), School social work: Practice, policy, and research (7th ed., pp. 3–29). Lyceum Books

Derrida, J. (2001). *Writing and difference*. Routledge.

Drewnowski, A., & Specter, S. E. (2004). Poverty and obesity: the role of energy density and energy costs. *The American Journal of Clinical Nutrition*, *79*(1), 6–16.

Edyburn, K. L., Bertone, A., Raines, T. C., Hinton, T., Twyford, J., & Dowdy, E. (2023). Integrating Intersectionality, Social Determinants of Health, and Healing: A New Training Framework for School-Based Mental Health. *School Psychology Review* , *52*(5), 563–585. https://doi.org/10.1080/2372966X.2021.2024767

Engler-Stringer, R., Black, J., Muhajarine, N., Martin, W., Gilliland, J., McVittie, J., Kirk, S., Wittman, H., Mousavi, A., Elliott, S., Hills, B., Androsoff, G., Field, D., Macdonald, B., Belt, C., & Vatanparast, H. (2021). The good food for learning universal curriculum-integrated healthy school lunch intervention: Protocol for a two-year matched control pre-post and case study. *JMIR Research Protocols*, *10*(9). https://doi.org/10.2196/30899

Gulo, N., Hulu, S. K., Bawamenewi, A., & Zendrato, R. Y. S. (2026). PERAN SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI UPTD SMP NEGERI 1 SIROMBU. *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, *6*(2), 613–621. https://doi.org/10.51878/educational.v6i2.9859

Heijnk, V., Hess, S., & Simmet, A. (2026). Does school lunch equalize? An examination of dietary quality and socioeconomic disparities in Germany. *Food Policy*, *141*. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103110

Jamal, N., & Adinda, A. S. (2026). Impact of the Free Nutritional Meal Program (MBG) on Students at MTs Ma'arif Pinrang Regency. *Golden Ratio of Data in Summary*, *6*(1), 22–34.

Kavula Sikirivwa, M. (2015). Deconstruction Theory And Its Background. Journal of English Literature and Culture, 3(7), 21

Keeley, B., Little, Cäš., & Zuehlke, E. (2019). The State of the World's Children 2019: Children, Food and Nutrition--Growing Well in a Changing World. *UNICEF*.

Kelly, M. S., Frey, A., Thompson, A., Klemp, H., Alvarez, M., & Berzin, S. C. (2016). Assessing the National School Social Work Practice Model: Findings from the Second National School Social Work Survey. *Social Work (United States)*, *61*(1), 17–28. https://doi.org/10.1093/sw/swv044

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial–politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *5*(1), 101–112.

Kim, C.-K. (2020). Jeffrey D. Sachs (2015). The Age of Sustainable Development (Foreword by Ban Ki-moon). New York, NY: Columbia University Press. *Asian Communication Research*, *17*(3), 166–174.

Koton, Y. P., Nusi, D., & Djaba, M. (2025). Kontribusi program makanan bergizi gratis (MBG) terhadap ekonomi lokal di Provinsi Gorontalo. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, *2*(2), 110–118.

Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025a). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: Analisis kualitatif dalam administrasi publik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 937–945.

Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025b). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: Analisis kualitatif dalam administrasi publik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 937–945.

Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A. J., & Taylor, S. (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. *The Lancet*, *372*(9650), 1661–1669.

Mishna, F., Muskat, B., & Cook, C. (2012). Anticipating challenges: School-based social work intervention research. *Children and Schools*, *34*(3), 135–144. https://doi.org/10.1093/cs/cds002

Mozin, S. Y., Tantu, R., Olii, T. P. A., Kaharu, R. K. J., & Van Gobel, S. (2026). Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis:(Studi Kualitatif pada SPPG di Bone Bolango). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 6320–6328.

Muchlis, N., Yusuf, R. A., Rusydi, A. R., Mahmud, N. U., Hikmah, N., Qanitha, A., & Ahsan, A. (2023). Cigarette Smoke Exposure and Stunting Among Under-five Children in Rural and Poor Families in Indonesia. *Environmental Health Insights*, *17*. https://doi.org/10.1177/11786302231185210

Octavia, L., & Nirmala, I. R. (2026). From gene to plate in Indonesia: a food system framework for the triple burden of malnutrition. *Frontiers in Public Health*, *14*, 1755411.

Organization, W. H. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024: Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms* (Vol. 2024). Food & Agriculture Org.

Peckover, C. A., Vasquez, M. L., Van Housen, S. L., Saunders, J. A., & Allen, L. (2012). *Preparing School Social Work for the Future: An Update of School Social Workers' Tasks in Iowa*.

Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(2 Mei), 2855–2866.

Rahman, A., Fikri, M., & Maysha, H. M. (2025). Reformasi program makan bergizi gratis untuk pemenuhan hak sosial ekonomi. *Jurnal Legislatif*, 82–104.

Riskesdas, T. (2019). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. *Lembaga Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*.

Saikhudin, M., Dewi, E., Sultan, U., & Riau, S. K. (n.d.). *EDUSOSHUM Journal of Islamic Education and Social Humanities Jacques Derrida's Deconstruction: Theory, Method and Its Application in Text and Discourse Studies*. *6*(3), 1600–1606.

Sari, N. H., Lionardo, A., Thamrin, M. H., & Putra, R. (2025). Free School Meals Policy as a Learning Framework for MBG in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, *5*. http://eduvest.greenvest.co.id

Sediq, M. S. (2024). Unravelling Deconstruction: A Comprehensive Examination of its Qualitative Research Method and Application in Historical Texts. *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, *3*(1), 5–9. https://doi.org/10.55559/sjahss.v3i1.210

Serang, A. E., Bolang, A. S. L., & Lapian, S. L. H. V. J. (2025). Evaluasi Kualitatif Logistik dan Distribusi dalam Program Makan Siang Bergizi Gratis: Studi Kasus Instrumental di Sekolah Menengah Atas Negeri, Kota Bitung, Indonesia. *Jurnal Promotif Preventif*, *8*(6), 1807–1814.

Somekh, B., & Lewin, C. (2005). Research Methods In The Social Sciences. London: SAGE Publications Ltd

Tabak, R. G., & Moreland-Russell, S. (2015). Food Service Perspectives on National School Lunch Program Implementation. *Health Behavior and Policy Review*, *2*(5), 362–371. https://doi.org/10.14485/hbpr.2.5.4

Thompson, H. R., Machado, S. S., Madsen, K. A., Cauchon-Robles, R., Neelon, M., & Ritchie, L. (2022). Impact of a Teacher Intervention to Encourage Students to Eat School Lunch. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(18). https://doi.org/10.3390/ijerph191811553

UNICEF. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*.

Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *12*(1), 144–151.

Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 1727–1736.

Yahya, M., & Martha, A. (2025). Guru profesional dengan tantangan tugas, fungsi, serta perannya dalam meningkatkan kompetensi pendidikan. *Jurnal Edumatika*, *1*(2), 60–70.